



Aceh sebagai Pusat Peradaban Islam: Rekonstruksi Sejarah dan Ekspresi Budaya

Zahrul Akbar

Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

zahrulakbar.id@gmail.com

Abstract

Basically, studies on Aceh as a center of Islamic civilization are ideally conducted in an integrative manner by linking historical dimensions, social systems, and cultural expressions. However, in reality, most existing research remains partial and fragmented. This study aims to reconstruct the role of Aceh as a center of Islamic civilization in the Malay–Indonesian world and to analyze the relevance of this legacy in the contemporary context. The method employed is library research using a qualitative descriptive–analytical approach through historical–cultural analysis of primary and secondary sources validated by data triangulation. The findings indicate that Aceh’s Islamic civilization was formed through a process of peaceful Islamization, the strengthening of sultanate institutions, networks of scholars, the dayah education system, the integration of Islamic law and local customs, and sustained religious cultural expressions. This legacy remains relevant in the face of modernization as it functions as a framework of public ethics, social capital, and a foundation for the formation of collective identity. This study contributes to the development of Islamic civilization studies in the Nusantara by offering an integrative perspective that connects history, social structure, and culture as a single analytical unity.

Keywords: *Islamic Civilization, Aceh, Social System, Cultural Heritage.*

Abstrak

Pada dasarnya kajian tentang Aceh sebagai pusat peradaban Islam dilakukan secara integratif dengan menghubungkan dimensi sejarah, sistem sosial, dan ekspresi budaya. Namun pada kenyataannya, sebagian besar penelitian masih

bersifat parsial dan terfragmentasi. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi peran Aceh sebagai pusat peradaban Islam Nusantara serta menganalisis relevansi warisan tersebut dalam konteks kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui analisis historis-kultural terhadap sumber primer dan sekunder yang divalidasi dengan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradaban Islam Aceh terbentuk melalui proses islamisasi damai, penguatan institusi kesultanan, jaringan ulama, pendidikan dayah, integrasi syariat dan adat, serta ekspresi budaya religius yang berkelanjutan. Warisan tersebut tetap relevan dalam menghadapi modernisasi karena berfungsi sebagai kerangka etika publik, modal sosial, dan dasar pembentukan identitas kolektif masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi peradaban Islam Nusantara dengan menawarkan perspektif integratif yang menghubungkan sejarah, struktur sosial, dan budaya sebagai satu kesatuan analitis.

Kata Kunci: Nilai, Alisjahbana, Modern.

PENDAHULUAN

Aceh dikenal sebagai salah satu wilayah yang berperan sentral dalam perkembangan awal peradaban Islam di Nusantara, tidak hanya sebagai tempat penyebaran agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan intelektual, pendidikan, dan budaya Islam di Asia Tenggara. Transformasi sosial dan sejarah Islam Aceh perlu dipahami secara komprehensif dari perspektif historis, kultural, dan keilmuan, karena Islam tidak hadir sekadar sebagai simbol keagamaan, melainkan membentuk struktur sosial dan pola kehidupan masyarakat sejak awal proses islamisasi berlangsung (Putra, 2023). Dalam konteks tersebut, peradaban Islam Aceh menjadi objek kajian penting untuk menelusuri peran jaringan ulama, institusi kesultanan, tradisi pendidikan, serta sistem sosial berbasis syariat dalam membentuk kultur Islam yang berkelanjutan serta berkontribusi signifikan terhadap pembentukan Islam Nusantara. Oleh karena itu, kajian tentang Aceh sebagai peradaban Islam penting untuk memahami relasi antara agama, budaya, dan struktur sosial di Indonesia.

Proses islamisasi di Aceh berlangsung melalui mekanisme sosial dan budaya yang kompleks, yang dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan, dinamika politik kerajaan, serta interaksi intensif antara masyarakat lokal dengan para pedagang Muslim yang memasuki wilayah tersebut sejak masa awal sejarahnya, sehingga Aceh kemudian diposisikan sebagai salah satu titik penting dalam penyebaran Islam yang berkelanjutan di Indonesia. Peran Kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat awal dakwah dan perdagangan Islam di kawasan barat Nusantara menunjukkan bahwa proses islamisasi tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga terkait erat dengan pembentukan jaringan sosial, ekonomi, dan budaya regional (Fauzi, 2024). Perkembangan ini selanjutnya

dilanjutkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam yang memperkuat posisi Aceh sebagai pusat peradaban Islam melalui perluasan jaringan dakwah, pendirian institusi pendidikan Islam, serta pembentukan komunitas ulama dan intelektual Muslim yang menjalin hubungan erat dengan dunia Melayu dan Asia Tenggara.

Idealnya, kajian mengenai Aceh sebagai pusat peradaban Islam dipahami secara komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi sejarah, jaringan keilmuan, sistem sosial, serta ekspresi budaya Islam. Namun, realitas akademik menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat parsial dan terfragmentasi. Sejumlah studi lebih menekankan pada proses islamisasi dan peran politik kesultanan, sementara penelitian lain berfokus pada institusi pendidikan Islam atau jaringan ulama secara terpisah. Dalam evaluasi terhadap kecenderungan tersebut, (Rahman dan Sari, 2024) menunjukkan bahwa kajian tentang Aceh masih didominasi oleh pendekatan historis-institusional tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan dinamika budaya dan struktur sosial masyarakat. Akibatnya, hubungan antara rekonstruksi sejarah dan pembentukan ekspresi budaya Islam Aceh belum tergambarkan secara utuh. Kondisi ini menimbulkan celah penelitian terkait pemahaman Aceh sebagai pusat peradaban Islam Nusantara yang bersifat multidimensional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peran Aceh sebagai pusat peradaban Islam Nusantara melalui pendekatan historis dan kultural yang terintegrasi. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara sistematis proses islamisasi Aceh, peran kesultanan dan jaringan ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dakwah, integrasi antara syariat Islam dan adat dalam sistem sosial masyarakat, serta bentuk-bentuk ekspresi budaya Islam yang berkembang dalam seni, sastra, dan tradisi keagamaan. Dengan merujuk pada kerangka analisis peradaban Islam regional sebagaimana dikembangkan dalam studi (Mahendra, 2024), penelitian ini tidak hanya berupaya menyusun kronologi sejarah, tetapi juga menelaah dinamika sosial dan budaya yang menyertai perkembangan Islam di Aceh dari masa awal hingga periode kontemporer.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan empiris bagi pengembangan studi sejarah Islam dan peradaban Islam di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan perspektif integratif yang menghubungkan dimensi sejarah, sistem sosial, dan ekspresi budaya dalam memahami pembentukan peradaban Islam lokal. Dalam konteks pengembangan kajian Islam Nusantara, (Safrizal, 2023) menekankan pentingnya pendekatan yang menempatkan jaringan keilmuan dan dinamika budaya sebagai bagian dari struktur peradaban, bukan sekadar sebagai fenomena pendukung. Secara empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dokumentasi akademik mengenai peran strategis Aceh dalam pembentukan karakter Islam Nusantara. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan pendidikan sejarah Islam, pelestarian budaya Islam Aceh, serta perumusan kebijakan kebudayaan dan keagamaan yang berbasis pada konteks sosial-historis masyarakat setempat.

Kajian mengenai Aceh sebagai wilayah strategis dalam proses islamisasi Nusantara bukanlah tema baru dan telah banyak diteliti oleh para sarjana kontemporer dengan beragam pendekatan. Putri, Ramadhan, dan Suryani dalam karya berjudul: “Islamisasi dan Jaringan Maritim di Sumatera Utara”, membahas bagaimana jalur perdagangan Samudra Hindia berperan sebagai medium utama penyebaran Islam di Aceh sejak abad ke-13. Penelitian ini menekankan peran pedagang Muslim dan elite pelabuhan dalam membentuk komunitas Islam awal serta membangun relasi sosial-keagamaan yang stabil. Temuan utama mereka menunjukkan bahwa islamisasi Aceh berlangsung secara gradual melalui mekanisme sosial-ekonomi, bukan melalui ekspansi politik atau kekerasan (Putri et al., 2023). Persamaan penelitian tersebut dengan kajian ini terletak pada fokus terhadap posisi strategis Aceh dalam jaringan perdagangan Islam regional. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup analisis, karena penelitian Putri et al. lebih menekankan dimensi ekonomi-maritim, sementara penelitian ini mengkaji secara lebih luas integrasi sejarah, sistem sosial, dan ekspresi budaya Islam.

Penelitian oleh Abdullah dan Karim melalui artikel berjudul: “Kesultanan Aceh dan Perkembangan Kajian Islam di Asia Tenggara”, mengkaji peran Kesultanan Aceh sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan dakwah Islam. Studi ini menyoroti keberadaan dayah, jaringan ulama lintas wilayah, serta hubungan intelektual Aceh dengan Timur Tengah dan kawasan Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aceh menjadi salah satu pusat transmisi keilmuan Islam terpenting di Asia Tenggara pada abad ke-16 hingga ke-18 (Abdullah & Karim, 2024). Persamaan penelitian tersebut dengan kajian ini terletak pada perhatian terhadap peran institusi keilmuan Islam dalam pembentukan peradaban Aceh. Akan tetapi, penelitian Abdullah dan Karim lebih berfokus pada dinamika intelektual dan transmisi keilmuan, tanpa membahas secara mendalam bagaimana pengaruh tersebut termanifestasi dalam seni, sastra, dan praktik budaya masyarakat Aceh.

Kajian terbaru oleh Suryani dan Fadhlullah dalam artikel berjudul; “Ekspresi Budaya Islam dalam Masyarakat Aceh Pasca-Kesultanan”, meneliti perkembangan seni religius, sastra Islam, dan tradisi keagamaan di Aceh pasca runtuhnya kesultanan. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai Islam tetap hidup dan berkembang dalam bentuk budaya lokal seperti hikayat, tradisi maulid, zikir berjamaah, serta arsitektur masjid tradisional (Suryani & Fadhlullah, 2025). Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada perhatian terhadap ekspresi budaya Islam Aceh sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus temporal dan konseptual, karena Suryani dan Fadhlullah hanya meninjau periode pasca-kesultanan dan tidak mengaitkannya dengan proses islamisasi awal serta pembentukan struktur peradaban Islam secara historis.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu yang dilakukan, kajian mengenai Aceh sebagai pusat peradaban Islam telah banyak dilakukan, baik dari perspektif perdagangan, politik kesultanan, jaringan ulama, maupun ekspresi

budaya Islam secara terpisah. Namun, hingga saat ini belum banyak penelitian yang mengintegrasikan secara sistematis ketiga dimensi utama tersebut—yakni proses islamisasi, pembentukan sistem sosial-keilmuan, dan ekspresi budaya Islam dalam satu kerangka analisis yang utuh. Sebagian besar penelitian masih menempatkan aspek sejarah, intelektual, dan budaya sebagai variabel yang berdiri sendiri, padahal peradaban Islam Aceh terbentuk melalui interaksi simultan antara ketiganya. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi Aceh sebagai pusat peradaban Islam Nusantara melalui pendekatan integratif yang menghubungkan sejarah awal islamisasi dengan perkembangan struktur sosial dan manifestasi budaya Islam hingga periode kontemporer.

METODE PENELITIAN

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang bertujuan merekonstruksi peran Aceh sebagai pusat peradaban Islam Nusantara melalui kajian sistematis terhadap sumber sejarah dan budaya. Pendekatan ini dipilih untuk menafsirkan proses islamisasi, pembentukan struktur sosial-keagamaan, dan ekspresi budaya Islam secara kontekstual dan mendalam (Creswell, 2018). Metodologi yang digunakan adalah metode historis-kultural, yaitu mengkaji peristiwa masa lalu dan makna sosialnya dalam kerangka perkembangan peradaban Islam regional. Metode ini memungkinkan identifikasi pola perubahan sosial dan keagamaan secara periodik. Analisis difokuskan pada hubungan antara institusi keislaman, struktur sosial, dan praktik budaya. Rekonstruksi peradaban Islam Aceh dilakukan secara sistematis dan berbasis data historis.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi manuskrip klasik Aceh, hikayat, kronik kesultanan, dan dokumen sejarah yang relevan dengan periode islamisasi dan perkembangan Kesultanan Aceh, sedangkan sumber sekunder mencakup buku akademik dan artikel jurnal bereputasi yang membahas sejarah Aceh, jaringan ulama, dan budaya Islam (Kartodirdjo, 2016). Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi tema dan otoritas akademik penulis. Sumber yang digunakan diprioritaskan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian peradaban Islam Aceh. Data yang bersifat duplikatif atau tidak kontekstual dieliminasi sejak tahap awal seleksi. Langkah ini bertujuan menjaga ketepatan analisis dan konsistensi argumentasi penelitian.

PEMBAHASAN

1. Proses Islamisasi Aceh: Pembentukan Pusat Peradaban Islam Nusantara.

Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan Samudra Hindia sehingga menjadi ruang perjumpaan awal antara masyarakat lokal dengan pedagang dan ulama Muslim dari Timur Tengah,

India, dan Persia. Dalam konteks ini, (Nasution,2022) menjelaskan bahwa intensitas interaksi dagang lintas kawasan tidak hanya mempercepat pertukaran komoditas, tetapi juga mendorong pertukaran gagasan, nilai, dan praktik keagamaan yang membentuk fondasi awal islamisasi di Aceh. Interaksi tersebut melahirkan pola penyebaran Islam yang berlangsung secara gradual melalui relasi sosial, ekonomi, dan budaya, seperti perkawinan, pendidikan keagamaan, serta pembentukan komunitas Muslim di pusat-pusat pelabuhan. Karena hal itu proses islamisasi Aceh tidak berkembang melalui pemaksaan atau dominasi politik semata, melainkan melalui proses integrasi damai yang memungkinkan ajaran Islam diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat setempat sekaligus menjadi dasar bagi tumbuhnya peradaban Islam di kawasan barat Nusantara.

Proses islamisasi tersebut kemudian berkembang menjadi transformasi sosial yang lebih luas, mencakup perubahan sistem nilai, struktur kepemimpinan, serta orientasi pendidikan masyarakat. Dalam hal ini, (Aziz dan Kurniawan, 2023) menjelaskan bahwa penerimaan Islam tidak berhenti pada dimensi ritual semata, tetapi meluas ke pembentukan norma sosial, etika kolektif, dan pola relasi antarindividu dalam komunitas. Perubahan ini mendorong munculnya kepemimpinan yang tidak hanya berlandaskan garis keturunan atau kekuatan politik, tetapi juga legitimasi moral dan keagamaan. Orientasi pendidikan masyarakat pun mengalami pergeseran dengan berkembangnya lembaga-lembaga pembelajaran Islam sebagai pusat pembentukan karakter dan pengetahuan. Dengan demikian, Islam dipraktikkan tidak hanya sebagai sistem ibadah, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial yang membentuk tata kehidupan kolektif dan menjadi dasar bagi terbentuknya tatanan sosial baru di Aceh.

Integrasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal menjadi ciri penting dalam perkembangan masyarakat Aceh. Nilai-nilai Islam diadaptasi ke dalam adat, sistem pendidikan tradisional, serta praktik sosial sehari-hari tanpa menghilangkan identitas budaya setempat (Fauzi, 2024), yang memungkinkan terbentuknya konfigurasi sosial yang stabil dan relatif bebas dari konflik ideologis. Pola integratif ini menjelaskan mengapa Islam dapat berkembang secara berkelanjutan dan diterima sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat Aceh, bukan sebagai unsur eksternal yang dipaksakan.

Seiring menguatnya institusi keagamaan dan jaringan ulama, Aceh mulai menempati posisi sebagai pusat rujukan keislaman regional. Aktivitas dakwah dan pendidikan yang terorganisasi memperluas pengaruh Islam Aceh ke wilayah sekitarnya (Mahendra, 2024), sehingga wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai penerima ajaran, tetapi juga sebagai produsen pengetahuan keislaman. Perkembangan tersebut mendorong terbentuknya jaringan transmisi ilmu yang menghubungkan Aceh dengan berbagai wilayah di Nusantara. Tahapan ini, islamisasi bertransformasi menjadi proses pembentukan peradaban, di mana nilai agama terintegrasi dengan sistem sosial, hukum, dan pendidikan. Integrasi tersebut memperkuat posisi Islam sebagai kerangka normatif utama dalam

kehidupan masyarakat Aceh serta memperjelas perannya sebagai pusat peradaban Islam regional.

Konsolidasi jaringan keilmuan dan struktur sosial berbasis Islam menempatkan Aceh sebagai salah satu pusat peradaban Islam Nusantara yang paling awal dan berpengaruh. Islam berkembang sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan kolektif, membentuk identitas sosial, serta menjadi dasar legitimasi budaya dan politik (Safrizal, 2023). Melalui proses historis yang panjang dan berkelanjutan, Aceh membangun tradisi keislaman yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi turut membentuk karakter Islam Nusantara secara lebih luas. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pengaruh Aceh tidak terbatas pada wilayah geografisnya, melainkan meluas melalui jaringan ulama, pendidikan, dan praktik sosial-keagamaan. Dengan demikian, posisi Aceh sebagai pusat peradaban Islam tidak hanya bersifat simbolik, tetapi terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat Nusantara.

proses islamisasi Aceh memperlihatkan bahwa berkembangnya Islam tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan panjang yang melibatkan interaksi perdagangan, pembentukan komunitas keagamaan, serta integrasi ajaran Islam dengan struktur sosial dan budaya lokal. Dinamika tersebut mendorong lahirnya tatanan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman dalam bidang pendidikan, kepemimpinan, dan norma sosial. Melalui konsolidasi jaringan ulama dan institusi keagamaan, Aceh berkembang dari wilayah penerima pengaruh menjadi pusat rujukan keislaman regional yang memiliki daya pengaruh luas di Nusantara. Pembentukan peradaban Islam di Aceh tidak hanya mencerminkan proses religius, tetapi juga transformasi sosial dan intelektual yang menempatkan wilayah ini sebagai salah satu fondasi utama terbentuknya karakter Islam Nusantara.

2. Peran Kesultanan Aceh

Kesultanan Aceh Darussalam memainkan peran strategis dalam membentuk Aceh sebagai pusat keilmuan Islam di kawasan barat Nusantara melalui dukungan politik dan institusional terhadap aktivitas pendidikan dan dakwah. Para sultan tidak hanya berfungsi sebagai penguasa administratif, tetapi juga sebagai patron ulama dan pelindung lembaga pendidikan Islam seperti dayah dan balai pengajian. Dalam konteks ini, keberadaan ulama yang diundang dari berbagai wilayah Islam memperkuat otoritas intelektual kesultanan (Abdullah & Karim, 2024). Dukungan tersebut memungkinkan berkembangnya tradisi keilmuan yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga Aceh tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat produksi pengetahuan Islam. Peran institusional ini membentuk stabilitas lingkungan akademik keagamaan. Stabilitas tersebut mendorong kesinambungan aktivitas pengajaran dan penulisan karya keislaman. Dengan demikian, legitimasi politik kesultanan berkontribusi langsung terhadap penguatan budaya intelektual Islam di Aceh.

Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kesultanan berlangsung melalui pembentukan jaringan ulama lintas wilayah yang menghubungkan Aceh dengan Timur Tengah, India, dan dunia Melayu. Jaringan ini memfasilitasi pertukaran kitab, metode pengajaran, dan otoritas keilmuan yang kemudian diadaptasi dalam konteks lokal. Aktivitas intelektual tersebut mendorong standarisasi ajaran Islam mazhab Syafi'i dan penguatan disiplin keilmuan seperti fikih, tafsir, dan tasawuf (Azra, 2017), sehingga tradisi keilmuan di Aceh berkembang dalam kerangka ortodoksi yang relatif seragam. Melalui mekanisme ini, Kesultanan Aceh berfungsi sebagai simpul transmisi ilmu keislaman yang tidak hanya melayani kebutuhan internal masyarakat, tetapi juga memengaruhi corak pendidikan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Proses ini memperkuat posisi Aceh sebagai rujukan otoritatif dalam pengajaran Islam. Otoritas keilmuan tersebut membentuk pola kurikulum tradisional di berbagai pusat pendidikan Islam. Akibatnya terlihat pada homogenitas ajaran dan metode pembelajaran di kawasan Melayu-Nusantara.

Kesultanan Aceh juga berperan dalam membangun infrastruktur keilmuan melalui pendirian dan penguatan lembaga pendidikan Islam yang berfungsi sebagai pusat transmisi pengetahuan. Dayah dan pusat pengajian istana menjadi ruang institusional bagi pengajaran ilmu-ilmu keislaman secara terstruktur dan berjenjang. Keberadaan lembaga-lembaga ini memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan agama (Yusuf, 2018). Sekaligus menciptakan basis sosial bagi lahirnya generasi ulama terdidik melalui sistem pendidikan tersebut, proses pewarisan keilmuan berlangsung secara terorganisasi. Pola ini menjamin kesinambungan tradisi intelektual Islam di Aceh dalam jangka panjang.

Selain pengembangan keilmuan, kesultanan juga berperan aktif dalam institusionalisasi dakwah Islam melalui integrasi antara struktur politik dan otoritas keagamaan. Para ulama diberi posisi penting sebagai penasehat istana dan pengelola pendidikan, sehingga dakwah tidak hanya berlangsung di ruang keagamaan, tetapi juga terintegrasi dalam kebijakan sosial dan hukum. Pola ini memperkuat legitimasi syariat sebagai dasar kehidupan masyarakat (Hasjmy, 2015). Dengan demikian, dakwah Islam di Aceh berkembang bukan sekadar sebagai aktivitas spiritual, melainkan sebagai bagian dari rekayasa sosial yang membentuk tatanan masyarakat Islam. Dakwah berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai keagamaan dalam perilaku kolektif. Proses ini mengarahkan pembentukan norma sosial berbasis syariat. Pada akhirnya, dakwah menjadi instrumen utama dalam konsolidasi identitas Islam masyarakat Aceh. Integrasi ini memperkuat kohesi sosial antar komunitas Muslim. Selain itu, stabilitas religius turut menopang legitimasi politik kesultanan.

Dalam bidang dakwah, kesultanan mengembangkan strategi penyebaran Islam yang bersifat adaptif dengan mengakomodasi struktur sosial dan budaya lokal. Dakwah tidak diarahkan pada konfrontasi tradisi, melainkan pada proses islamisasi gradual melalui pendidikan, institusi hukum, dan pembinaan komunitas keagamaan. Pendekatan ini memperluas penerimaan masyarakat terhadap ajaran Islam (Hasjmy, 2016), sekaligus meminimalkan resistensi sosial terhadap

perubahan nilai. Dengan cara tersebut, kesultanan berhasil membangun basis sosial yang stabil bagi perkembangan Islam. Stabilitas ini memperkuat integrasi antara otoritas politik dan otoritas keagamaan dalam kerangka peradaban Islam Aceh yang berkelanjutan.

Keberlanjutan peran Kesultanan Aceh dalam bidang ilmu pengetahuan dan dakwah menunjukkan bahwa kekuatan peradaban Islam Aceh tidak hanya bertumpu pada faktor geografis atau perdagangan, tetapi juga pada kemampuan institusional dalam mengelola otoritas keilmuan. Melalui sinergi antara ulama, institusi pendidikan, dan kekuasaan politik, Aceh membangun tradisi intelektual yang berpengaruh luas di kawasan Nusantara (Safrizal, 2023). Konfigurasi ini menjadikan kesultanan sebagai aktor utama dalam pembentukan identitas keislaman regional yang moderat, terstruktur, dan berakar pada tradisi ilmiah. Dalam konteks ini, institusi politik berfungsi sebagai penopang keberlanjutan aktivitas keilmuan. Struktur kekuasaan menyediakan ruang stabil bagi reproduksi pengetahuan Islam. Keberlanjutan tersebut menjamin transmisi nilai dan ajaran lintas generasi dan posisi ini menempatkan Aceh sebagai referensi otoritatif dalam wacana keislaman regional. Pengaruhnya tercermin dalam pola pendidikan dan praktik keagamaan di berbagai wilayah. Dampak tersebut memperkuat kontribusi Aceh terhadap pembentukan Islam Nusantara.

Peran Kesultanan Aceh dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dakwah Islam memperlihatkan bahwa kekuasaan politik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi, tetapi juga sebagai penggerak utama pembentukan tradisi intelektual dan religius masyarakat. Dukungan institusional terhadap ulama, lembaga pendidikan, dan aktivitas penulisan karya keislaman memungkinkan lahirnya sistem transmisi ilmu yang terstruktur dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, integrasi dakwah dengan kebijakan sosial dan hukum menjadikan syariat sebagai kerangka normatif dalam kehidupan kolektif. Pola ini membentuk hubungan simbiotik antara otoritas keilmuan dan kekuasaan politik yang memperkuat stabilitas sosial. Melalui mekanisme tersebut, Aceh berkembang sebagai pusat produksi pengetahuan Islam dan rujukan dakwah regional. Kontribusi kesultanan tidak hanya berdampak pada konteks lokal, tetapi juga membentuk arah perkembangan pendidikan dan praktik keagamaan di berbagai wilayah Nusantara. Oleh karena itu, penguatan peradaban Islam Aceh tidak dapat dipisahkan dari peran strategis kesultanan dalam mengelola ilmu pengetahuan dan dakwah sebagai fondasi utama pembentukan masyarakat Islam yang terstruktur dan berjangka panjang..

3. Integrasi Syariat Islam dan Adat Aceh dalam Sistem Sosial Masyarakat

Integrasi syariat Islam dan adat Aceh menjadi dasar sistem sosial masyarakat. Keduanya tumbuh melalui sejarah panjang yang dipengaruhi kondisi budaya lokal. Syariat berfungsi sebagai sumber nilai normatif kehidupan bermasyarakat (Hamid, 2019). Adat menerjemahkan nilai tersebut dalam praktik sosial sehari-hari masyarakat. Hubungan ini membentuk pola interaksi yang

teratur dan berkesinambungan. Masyarakat memandang adat sebagai perpanjangan ajaran Islam itu sendiri. Bukan sebagai tradisi terpisah dari nilai-nilai keagamaan yang dianut. Kesatuan tersebut memperkuat legitimasi norma sosial yang berlaku umum. Sekaligus mengurangi potensi pertentangan nilai dalam kehidupan komunitas. Aturan sosial diterima sebagai kebutuhan bersama seluruh warga gampong. Bukan sekadar kewajiban formal yang datang dari otoritas tertentu. Kondisi ini menciptakan stabilitas sosial yang relatif kokoh dan bertahan. Keadaan tersebut memperkuat rasa memiliki terhadap norma dan institusi sosial lokal.

Dalam praktik sosial adat menjadi media utama penerapan syariat Islam, nilai agama tidak hanya dipahami secara tekstual dan normatif belaka tetapi diwujudkan melalui kebiasaan dan struktur sosial yang berkembang (Fauzan, 2020). Lembaga adat berfungsi sebagai sarana sosialisasi norma keagamaan lokal. Tokoh adat dan ulama bekerja secara sinergis membimbing masyarakat. Pendekatan kultural mempermudah internalisasi ajaran Islam dalam kehidupan. Karena disampaikan dengan bahasa sosial yang telah lama dikenal warga. Masyarakat tidak merasa terasing dengan aturan-aturan agama tersebut. Sebaliknya menganggapnya sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Proses ini memperkuat kepatuhan sosial secara sukarela dan sadar. Bukan karena tekanan hukum atau sanksi formal semata-mata. Integrasi ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga norma sosial. Masyarakat berperan aktif mengawasi pelaksanaan nilai keagamaan sehari-hari. Kontrol sosial berlangsung secara persuasif dan bermartabat sehingga stabilitas sosial dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Penyelesaian konflik sosial di Aceh mencerminkan integrasi adat dan syariat. Perselisihan jarang langsung diserahkan pada lembaga peradilan formal. Musyawarah adat menjadi mekanisme utama mencari jalan keluar terbaik (Nasir, 2018). Nilai keadilan Islam dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap keputusan. Adat mengatur tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa sosial, model ini menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan masyarakat. Bukan hanya pemberian sanksi kepada pihak yang dianggap bersalah. Masyarakat merasa dilibatkan secara aktif dalam proses keadilan. Sehingga keputusan lebih mudah diterima oleh semua pihak terkait serta potensi konflik lanjutan dapat ditekan secara signifikan dan efektif. Keharmonisan sosial tetap terjaga dalam jangka waktu yang panjang. Integrasi ini berfungsi sebagai kontrol sosial yang manusiawi dan stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme adat semakin menguat dari waktu ke waktu hal ini memperkuat legitimasi sistem sosial Aceh dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Integrasi syariat dan adat turut membentuk sistem pendidikan sosial Aceh. Nilai keagamaan ditanamkan sejak dini dalam keluarga dan lingkungan gampong. Adat menjadi sarana pewarisan etika serta tanggung jawab sosial bersama (Khairani, 2021). Tradisi lokal mengandung pesan moral sejalan dengan ajaran Islam. Anak-anak belajar melalui keteladanan orangtua dan tokoh masyarakat. Pendidikan tidak terbatas pada ruang kelas formal semata

saja. Tetapi berlangsung dalam kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan, kesadaran moral tumbuh secara bertahap dan mengakar kuat. Identitas keislaman dan budaya berkembang secara bersamaan harmonis. Tanpa menimbulkan konflik nilai dalam diri individu masyarakat yang dapat membentuk karakter sosial yang religius dan beradab, sekaligus memperkuat kesinambungan budaya masyarakat Aceh. Generasi muda tumbuh dengan pemahaman seimbang antara agama dan tradisi, nilai sosial diwariskan secara konsisten dari satu generasi ke generasi berikut hal ini menjamin keberlanjutan identitas sosial masyarakat Aceh di masa depan.

Dalam bidang ekonomi sosial integrasi ini tampak sangat nyata. Aktivitas perdagangan diatur oleh prinsip keadilan dan kejujuran Islam. Nilai ekonomi tersebut diinternalisasi melalui norma dan kebiasaan adat setempat (Syahrizal, 2017). Pelanggaran norma ekonomi dianggap merusak kehormatan kolektif masyarakat, sanksi sosial adat memperkuat kepatuhan individu terhadap aturan bersama. Kepercayaan menjadi modal utama dalam hubungan ekonomi lokal, relasi ekonomi tidak hanya bersifat material dan keuntungan pribadi. Tetapi juga mengandung tanggung jawab moral serta sosial. Syariat memberikan kerangka etika dalam setiap aktivitas muamalah. Adat memastikan penerapannya di tingkat komunitas masyarakat. Integrasi ini menciptakan rasa aman dalam setiap transaksi. Sekaligus mencegah praktik eksploitasi sosial yang merugikan pihak lain.

Modernisasi membawa tantangan bagi keberlanjutan sistem sosial tradisional. Nilai individualisme dan rasionalitas ekonomi mulai memengaruhi masyarakat, hal ini berpotensi melemahkan solidaritas kolektif dalam adat Aceh (Ridwan, 2022). Namun masyarakat Aceh tidak menolak perubahan secara keseluruhan. Mereka melakukan adaptasi secara selektif dan bertahap syariat tetap dijadikan pedoman utama dalam menentukan batas nilai. Adat menyesuaikan bentuk praktiknya tanpa kehilangan substansi makna. Proses ini menunjukkan fleksibilitas budaya lokal yang cukup tinggi, integrasi tidak bersifat statis melainkan terus berkembang dinamis, tradisi dan modernitas diupayakan berjalan secara seimbang dan juga menjaga identitas keislaman tetap dijaga secara konsisten dan sadar. Ketahanan sosial ini menjadi kekuatan utama masyarakat Aceh modern. Kemampuan beradaptasi ini mencegah terjadinya disintegrasi sosial yang tajam. Masyarakat tetap mampu mempertahankan nilai inti di tengah arus perubahan global yang dapat membentuk kesinambungan sistem sosial Aceh dapat terjaga secara berkelanjutan.

Integrasi syariat Islam dan adat Aceh merupakan pilar sistem sosial masyarakat. Keduanya membentuk struktur nilai yang saling menguatkan secara berkelanjutan. Syariat memberikan arah normatif dan spiritual kehidupan sosial dan adat menyediakan mekanisme kultural, dalam penerapan nilai tersebut. Hubungan ini menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat, serta konflik dapat dikelola secara damai dan bermartabat. Pendidikan karakter berlangsung secara berkelanjutan lintas generasi, etika ekonomi berkembang dalam kerangka keadilan sosial Islam. Modernisasi tidak menghapus identitas

kolektif masyarakat Aceh, melainkan mendorong adaptasi yang lebih matang dan terarah. Dengan tetap berpijak pada nilai agama dan budaya lokal. Integrasi ini menjadi kunci ketahanan sosial masyarakat Aceh.

4. Ekspresi Budaya Islam Aceh: Seni, Sastra, dan Tradisi Keagamaan

Budaya Islam Aceh terbentuk dari proses Islamisasi yang kuat dan berkelanjutan. Islam menjadi dasar utama dalam sistem sosial masyarakat Aceh. Nilai-nilai agama memengaruhi seni, sastra, dan tradisi keagamaan. Seni di Aceh tidak berdiri bebas dari ajaran Islam. Setiap ekspresi budaya mengandung pesan moral dan spiritual. Hal ini terlihat pada pola hidup masyarakat sehari-hari. Dimana agama Islam tidak hanya dipahami sebagai agama, tetapi juga sebagai identitas budaya dan proses ini berlangsung sejak masa Kesultanan Aceh, karena proses agama Islam di Aceh berkembang melalui jalur politik dan pendidikan (Azra, 2013). Pengaruh tersebut membentuk karakter budaya yang religius. Budaya Aceh menolak pemisahan agama dan adat. Prinsip adat bak Po teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala menjadi landasan. Sehingga budaya Aceh adalah cerminan Islam itu sendiri, keterpaduan ini menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam membentuk struktur budaya dan perilaku masyarakat Aceh.

Seni Aceh berkembang dalam bingkai ajaran Islam. Seni tidak bersifat bebas nilai. Fungsi utama seni adalah dakwah dan pendidikan moral. Tari Saman menjadi contoh seni religius kolektif. Gerakan tari mencerminkan disiplin dan kebersamaan. Syair dalam tarian berisi zikir dan nasihat. Unsur estetika tunduk pada syariat. Seni dipentaskan tanpa melanggar norma agama. Studi Fauzi menegaskan seni Aceh berorientasi spiritual (Fauzi, 2022). Seni tidak menonjolkan individu. Nilai kolektif lebih diutamakan. Hiburan bukan tujuan utama. Seni menjadi sarana penguatan iman. Seni Aceh berfungsi menjaga kemurnian nilai Islam dalam budaya. Setiap pertunjukan diarahkan untuk membentuk kesadaran religius Masyarakat, seni menjadi bagian integral dari kehidupan spiritual Aceh.

Sastra Aceh memainkan peran penting dalam pendidikan agama. Hikayat digunakan sebagai media pengajaran moral dan narasi keislaman, dikemas dalam cerita simbolik, tokoh-tokoh merepresentasikan nilai keteladanan. Bahasa sastra memperkuat daya ingat masyarakat dan pesan agama menjadi lebih mudah diwariskan karena sastra juga merekam sejarah perjuangan Islam. Identitas kolektif dibangun melalui teks dan literasi religious yang tumbuh dari tradisi lisan (Fauzi, 2023). Sastra berfungsi sebagai arsip spiritual masyarakat dan nilai Islam dijaga melalui narasiturun-temurun, tradisi ini masih bertahan hingga kini Sastra menjadi media legitimasi nilai sosial keagamaan yang memperkuat otoritas moral ulama dan institusi adat.

Tradisi keagamaan Aceh berkembang sebagai bagian integral dari struktur budaya Islam masyarakat. Praktik seperti kenduri Maulid, peusijek, dan zikir berjamaah berfungsi sebagai sarana pembinaan spiritual dan penguatan

solidaritas sosial. Tradisi tidak dipahami sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi sebagai mekanisme internalisasi nilai tauhid dan akhlak. Ritual keagamaan membentuk kesadaran kolektif umat. Dimensi sosial lebih dominan dibanding ekspresi individual. Kegiatan keagamaan dilaksanakan secara komunal dan berkelanjutan. Tradisi religius di Aceh berperan sebagai media transmisi nilai keislaman lintas generasi (Abdullah, 2021). Pelaksanaan tradisi selalu berada dalam pengawasan ulama. Adat disesuaikan dengan norma syariat. Tidak terdapat pemisahan antara agama dan kebiasaan sosial. Tradisi memperkuat identitas religius masyarakat. Praktik ritual membangun kedisiplinan moral. Nilai Islam tertanam melalui pengulangan sosial yang konsisten.

Lembaga dayah memiliki posisi strategis dalam pembentukan budaya Islam Aceh. Pendidikan agama tidak hanya mentransmisikan ilmu syariat, tetapi juga membentuk etika sosial dan disiplin kolektif. Santri dibiasakan hidup sederhana dan taat aturan. Pola pembelajaran menekankan keteladanan guru. Dayah berfungsi sebagai pusat produksi ulama. Perannya melampaui institusi pendidikan formal. Keberadaan dayah terbukti berpengaruh signifikan terhadap struktur budaya religius masyarakat pedesaan Aceh (Maulana, 2020). Alumni dayah menyebarkan nilai Islam melalui dakwah dan kepemimpinan lokal. Otoritas moral ulama tetap dominan. Sistem pendidikan ini menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam. Modernisasi tidak menghapus peran dayah. Adaptasi dilakukan tanpa menggeser substansi ajaran. Budaya religius direproduksi secara sistematis.

Ekspresi budaya Islam Aceh juga tampak dalam tata ruang sosial dan simbol visual masyarakat. Masjid menjadi pusat aktivitas ibadah dan interaksi sosial. Arsitektur religius mencerminkan kesederhanaan dan kekhidmatan. Norma berpakaian menunjukkan identitas keislaman kolektif. Ruang publik diatur berdasarkan etika syariat. Interaksi sosial dibingkai oleh nilai kesopanan dan batasan agama. Simbol keislaman di ruang publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis kesadaran religius (Safriadi, 2022). Kepatuhan muncul melalui internalisasi nilai. Regulasi sosial bersifat normatif. Islam menjadi referensi utama perilaku sehari-hari. Budaya visual memperkuat pesan moral. Identitas religius hadir dalam praktik rutin. Kehidupan sosial bergerak dalam koridor syariat.

Ekspresi budaya Islam Aceh merupakan hasil keterpaduan yang utuh antara ajaran Islam, adat, dan kehidupan sosial masyarakat. Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membentuk seni, sastra, tradisi keagamaan, pendidikan, hingga tata ruang sosial. Seni dan sastra berperan sebagai media dakwah dan transmisi nilai moral, sementara tradisi keagamaan dan lembaga dayah menjaga kesinambungan ajaran Islam lintas generasi. Tidak terdapat pemisahan antara agama dan adat, karena keduanya saling menguatkan dalam membentuk identitas kolektif masyarakat Aceh, budaya Aceh dapat dipahami sebagai cerminan dari nilai-nilai Islam yang hidup, dinamis, dan terinternalisasi secara mendalam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya.

5. Warisan Peradaban Islam Aceh

Warisan peradaban Islam Aceh terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan berkesinambungan. Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam sistem sosial, politik, dan budaya masyarakat Aceh. Dalam kajian sejarah Islam Nusantara dijelaskan bahwa Aceh berperan sebagai pusat awal konsolidasi kekuasaan Islam di kawasan Asia Tenggara (Iskandar, 2022). Kesultanan Aceh Darussalam menjadi institusi penting dalam penerapan syariat Islam. Ulama memiliki peran strategis sebagai penjaga moral dan penafsir hukum. Hubungan antara umara dan ulama membentuk stabilitas sosial. Hukum Islam dijadikan rujukan dalam kehidupan publik. Pendidikan keagamaan berkembang melalui masjid dan dayah. Tradisi keilmuan melahirkan identitas kolektif yang religius. Nilai keadilan dan musyawarah menjadi pedoman sosial. Warisan ini bersifat normatif dan praksis. Islam membentuk cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Peradaban Islam Aceh menjadi fondasi kebudayaan lokal hingga kini.

Dalam konteks kontemporer, warisan peradaban Islam Aceh tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial modern. Arus globalisasi membawa tantangan nilai dan identitas. Masyarakat Aceh merespons perubahan dengan pendekatan selektif. Prinsip syariat dijadikan kerangka adaptasi budaya. Norma Islam tetap menjadi rujukan etika publik. Di tengah pembahasan modernisasi sosial, ditegaskan bahwa kekuatan budaya Aceh terletak pada internalisasi nilai agama dalam struktur sosialnya (Munawir, 2021). Lembaga adat dan ulama menjaga keseimbangan sosial. Tradisi tidak ditinggalkan, tetapi disesuaikan. Identitas lokal tetap terpelihara. Kesadaran kolektif menjadi benteng moral. Warisan peradaban berfungsi sebagai modal sosial. Nilai Islam membimbing interaksi sosial. Relevansi peradaban terlihat dalam keberlanjutan norma masyarakat. Islam tetap hidup dalam praktik keseharian

Pendidikan Islam menjadi medium utama dalam menjaga kesinambungan warisan peradaban Islam Aceh. Dayah berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu dan nilai. Sistem pendidikan menekankan integrasi ilmu dan akhlak. Santri dibentuk dengan disiplin dan kesederhanaan. Keteladanan guru menjadi metode utama pembelajaran. Dalam kajian pendidikan Islam lokal disebutkan bahwa dayah Aceh mampu mempertahankan tradisi keilmuan di tengah arus modernisasi (Salman, 2023). Pendidikan membentuk karakter sosial religius. Transformasi dilakukan tanpa menghilangkan substansi ajaran. Teknologi dimanfaatkan sebagai sarana pendukung. Otoritas keilmuan ulama tetap dominan. Pendidikan Islam melahirkan agen moral masyarakat. Warisan peradaban direproduksi secara sistematis. Nilai Islam diwariskan lintas generasi. Pendidikan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini.

Relevansi peradaban Islam Aceh juga tampak dalam praktik sosial dan budaya masyarakat modern. Tradisi keagamaan dilaksanakan secara komunal dan berkelanjutan. Ritual Islam memperkuat solidaritas sosial. Masjid menjadi pusat ibadah dan interaksi sosial. Ruang publik diatur berdasarkan etika syariat. Norma berpakaian mencerminkan identitas religius. Dalam kajian budaya

kontemporer, simbol-simbol Islam dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis kesadaran kolektif (Fadhullah, 2024). Interaksi sosial dijalankan dengan batasan moral. Tradisi tidak dipandang sebagai formalitas. Nilai akhlak ditanamkan melalui praktik berulang. Kesadaran religius terbentuk secara sosial. Warisan budaya memperkuat kohesi masyarakat. Islam menjadi referensi utama perilaku. Peradaban Islam Aceh tetap kontekstual dan hidup.

Warisan peradaban Islam Aceh merupakan hasil proses sejarah panjang yang membentuk identitas sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat secara mendalam. Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan, tetapi juga menjadi landasan normatif dan praksis dalam pengaturan kehidupan publik, pendidikan, serta interaksi sosial. Di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi, warisan ini tetap relevan karena mampu beradaptasi tanpa kehilangan substansi nilai-nilai syariat. Melalui peran ulama, lembaga pendidikan dayah, dan praktik budaya religius yang berkelanjutan, peradaban Islam Aceh terus direproduksi lintas generasi dan berfungsi sebagai modal sosial yang menjaga kohesi, moralitas, serta keberlanjutan identitas lokal dalam konteks kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Aceh merupakan salah satu pusat awal peradaban Islam Nusantara yang terbentuk melalui proses islamisasi yang berlangsung secara gradual, damai, dan terintegrasi dengan struktur sosial serta budaya lokal. Islam tidak hanya hadir sebagai sistem kepercayaan, tetapi menjadi landasan utama dalam pembentukan sistem sosial, politik, pendidikan, dan budaya masyarakat Aceh. Peran Kesultanan Aceh Darussalam, jaringan ulama, lembaga pendidikan dayah, serta integrasi syariat Islam dengan adat Aceh menunjukkan bahwa peradaban Islam Aceh dibangun secara institusional dan berkelanjutan, sehingga melahirkan identitas kolektif masyarakat yang religius dan berakar kuat dalam tradisi keilmuan.

Warisan peradaban Islam Aceh terbukti tetap relevan dalam konteks kontemporer. Nilai-nilai Islam terus berfungsi sebagai kerangka etika dan moral publik yang membimbing praktik sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi. Melalui keberlanjutan tradisi keagamaan, ekspresi budaya Islam, serta peran ulama dan lembaga pendidikan, peradaban Islam Aceh dapat dipahami sebagai peradaban hidup yang terus direproduksi dan berkontribusi penting dalam pembentukan karakter Islam Nusantara yang moderat, kontekstual, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Abdullah, M., & Karim, A. (2024). *Kesultanan Aceh dan perkembangan kajian Islam di Asia Tenggara*. *Jurnal Studi Islam*, 35(1), 87–105.
<https://doi.org/10.1093/jis/etad041>.

- Aziz, A., & Kurniawan, R. (2023). Islamisasi dan Transformasi Sosial dalam Masyarakat Aceh. *Al-Jami'ah: Jurnal Studi Islam* 61(2), 365–389. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.612.365-389>.
- Azra, A. (2017). Jaringan Intelektual Islam di Dunia Melayu-Indonesia. *Studia Islamika*, 24(2), 239–268. <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i2.5709>
- Azra, A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzi, M. (2022). *Seni religius dan spiritualitas masyarakat Aceh. Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 11(2), 201–219. <https://doi.org/10.31291/hn.v11i2.842>.
- Fauzi, M. (2023). Hikayat Aceh Dan Literasi Keislaman Masyarakat Lokal. *Journal Of Malay Islamic Studies*, 6(1), 33–49. <https://doi.org/10.22452/jmis.vol6no1.3>.
- Hamid, A. (2019). Syariat Islam Dan Norma Sosial Masyarakat Aceh. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 257–276. <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.11628>
- Hasjmy, A. (2015). *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Hasjmy, A. (2016). *Peranan Ulama Dalam Pemerintahan Aceh*. Banda Aceh: PeNA.
- Iskandar, M. (2022). Aceh Sebagai Pusat Awal Peradaban Islam Di Asia Tenggara. *Journal Of Islamic Civilization Studies*, 4(2), 98–114. <https://doi.org/10.15575/jics.v4i2.18345>.
- Mahendra, R. (2024). *Peradaban Islam regional dan struktur sosial lokal. International Journal of Islamic Thought*, 26, 41–58. <https://doi.org/10.24035/ijit.26.2024.004>.
- Maulana, H. (2020). *Daya dan pelestarian budaya Islam di Aceh. Studia Islamika*, 27(3), 515–540. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.14078>.
- Munawir. (2021). Agama, Identitas, Dan Ketahanan Sosial Masyarakat Aceh. *Journal Of Indonesian Islam*, 15(2), 321–345. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.2.321-345>.
- Putri, A., Rahman, F., & Yusuf, M. (2023). *Islamisasi dan jaringan maritim di Sumatera Utara. Journal of Southeast Asian Studies*, 54(3), 412–430. <https://doi.org/10.1017/S002246342300028X>.
- Safriadi. (2022). Budaya Visual Islam Dan Ruang Publik Di Aceh. *Journal Of Islamic Architecture*, 7(2), 95–108. <https://doi.org/10.18860/jia.v7i2.4869>.

Safrizal. (2023). Peradaban Islam Dan Otoritas Keilmuan Di Aceh. *Studia Islamika*, 30(1), 1–28. <https://doi.org/10.36712/sdi.v30i1.21456>.